

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konflik kebijakan reklamasi Pulau Lae-Lae di Kota Makassar sebagai manifestasi benturan antara kekuasaan dan hegemoni pemerintah daerah dengan resistensi masyarakat lokal yang kokoh. Konflik merepresentasikan pertentangan fundamental antara agenda pembangunan ekonomi berorientasi pertumbuhan yang diusung koalisi pemerintah-investor dengan upaya masyarakat mempertahankan nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, penelitian mengintegrasikan tiga kerangka analisis: *Policy Conflict Framework* (PCF) untuk mengidentifikasi komponen konflik, *Historical-Materialist Policy Analysis* (HMPA) untuk menyoroti relasi kekuasaan, serta *Conflict Stake Typology* untuk kategorisasi watak konflik. Hasil penelitian menunjukkan konflik berwatak dominan ideologis dengan intensitas tinggi, ditandai resistensi publik masif dan rendahnya kesediaan berkompromi. Temuan kunci membuktikan efektivitas resistensi komunitas berhasil memaksa penundaan substansial implementasi reklamasi, pergeseran sikap pemerintah menjadi lebih akomodatif, pembentukan tim evaluasi khusus, serta meningkatnya peran DPRD dan masyarakat sipil. Penelitian berkontribusi pada literatur kebijakan publik dengan menunjukkan bagaimana kekuatan sosial masyarakat lokal mampu mengimbangi, bahkan menggoyahkan, kekuasaan struktural pemerintah daerah dalam konteks pembangunan Indonesia.

Kata Kunci: Kekuasaan, Hegemoni, Resistensi Masyarakat, Konflik Kebijakan, Reklamasi Pulau Lae-Lae.

ABSTRACT

This research analyzes the policy conflict of Lae-Lae Island reclamation in Makassar City as a manifestation of the collision between the power and hegemony of local government and the steadfast resistance of local communities. The conflict represents a fundamental opposition between the growth-oriented economic development agenda promoted by the government-investor coalition and the community's efforts to maintain their social, cultural, and environmental values. Using a descriptive qualitative design with a case study approach, the research integrates three analytical frameworks: the Policy Conflict Framework (PCF) to identify conflict components, Historical-Materialist Policy Analysis (HMPA) to highlight power relations, and Conflict Stake Typology for categorizing the nature of conflict. The research results show that the conflict has a dominant ideological character with high intensity, marked by massive public resistance and low willingness to compromise. Key findings prove the effectiveness of community resistance successfully forced substantial delays in reclamation implementation, a shift in government stance to become more accommodative, the formation of a special evaluation team, and increased roles of the Regional House of Representatives (DPRD) and civil society. The research contributes to public policy literature by demonstrating how the social power of local communities is capable of counterbalancing, even destabilizing, the structural power of local government in the context of Indonesian development.

Keywords: Power, Hegemony, Community Resistance, Policy Conflict, Lae-Lae Island Reclamation.